

Nomor : 056/MTI/CORSEC/EXT/IX/2021
Lampiran : 1 Eksemplar

Jakarta, 27 September 2021

Kepada Yth :

- 1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**
di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan
Lapangan Banteng Timur 2-4, Sawah Besar
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10710
- 2. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 3
PT. Bursa Efek Indonesia**
Indonesia Stock Exchange Building
Jl.Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

**Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Atas Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik
Sehubungan Dengan Informasi atau Fakta Material PT Mora Telematika Indonesia
("Perseroan").**

Surat ini kami sampaikan berdasarkan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (untuk selanjutnya disebut "IDX IE"); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material oleh emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31"); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 7"); Ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Nomor 65 tanggal 25 September 2017 beserta perubahan-perubahannya ("PWA OB"); Ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 nomor 9 tanggal 1 April 2019 beserta perubahan-perubahannya ("PWA SI"); Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 nomor 46 tanggal 17 Juli 2020 beserta perubahan-perubahannya ("PWA SII"); Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 nomor 30 tanggal 18 September 2020 beserta perubahan-perubahannya ("PWA SIII"); Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 nomor 26 tanggal 16 April 2021 beserta perubahan-perubahannya ("PWA SIV"); dan surat Perseroan kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia nomor 055/CORSEC/EXT/IX/2021 tanggal 27 September 2021 perihal Keterbukaan Informasi yang perlu diketahui publik sehubungan dengan adanya Persetujuan Rencana Transaksi Akuisisi Saham PT Indo Pratama Teleglobal yang mana telah dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK IDX tertanggal 27 September 2021 ("Surat Keterbukaan Informasi")

Dengan hormat,

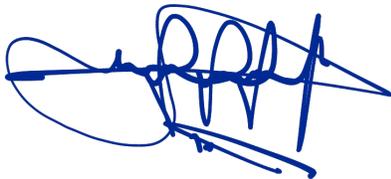
Berdasarkan IDX IE, POJK 31, POJK 7, PWA OB, PWA SI, PWA SII, PWA SIII dan PWA SIV, melalui surat ini kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia mengenai penyampaian Bukti Iklan atas Surat Keterbukaan Informasi sebagaimana disebutkan diatas.

Bahwa Informasi tersebut dimuat dalam surat kabar Investor Daily halaman 19, pada hari Senin, 27 September 2021.

Demikian yang dapat kami sampaikan dan apabila terdapat informasi yang dibutuhkan mengenai surat ini terkait isu hukum, mohon untuk menghubungi Bapak Henry Rizard Rumopa (081310278078 - henry.rumopa@moratelindo.co.id atau corsec@moratelindo.co.id) dan terkait isu keuangan dan akuntansi, mohon untuk menghubungi Bapak Genta Andika Putra (081287667934 - genta.putra@moratelindo.co.id).

Hormat Kami,

Digitally signed by **Henry Rizard Rumopa (YR8078)**
Signed at: Sep 27, 2021 13:51:58



Nama : Henry Rizard Rumopa
Jabatan : Sekretaris Perusahaan

Tembusan :

1. PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Obligasi;
2. PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah I, II, III dan IV; dan
3. Arsip



Investor Daily/David Gita Roza



Pemasaran Digital Asuransi

Pekerja berdiri di salah satu kantor Asuransi, Jakarta, belum lama ini. Kondisi pandemi Covid-19 memicu peningkatan pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali sektor industri asuransi. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Juli 2021, premi asuransi yang dibukukan melalui pemasaran digital sudah mencapai Rp 6 triliun. Kontribusi premi asuransi lewat kanal distribusi digital yang dibukukan oleh perusahaan asuransi umum dan asuransi jiwa tersebut telah mencapai 3,94 persen dari total premi asuransi umum dan jiwa.

Fintech Lending Tingkatkan Target Penyaluran Pembiayaan Jadi Rp 125 Triliun

Oleh Prisma Ardianto

► JAKARTA – *Fintech peer to peer (P2P) lending* meningkatkan target penyaluran pembiayaan dari Rp 86-100 triliun menjadi Rp 100-125 triliun pada tahun ini. Target tersebut lebih optimistis meski jumlah penyelenggara relatif berkurang.

Demikian materi paparan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) tentang Pencairan Pinjaman 2017-2020 dan Outlook 2021 yang telah diperbarui. Sebelumnya, AFPI diketahui sudah dua kali mengubah proyeksi penyaluran pembiayaan pada 2021. Awalnya, proyeksi pembiayaan 2021 dipatok sebesar Rp 86 triliun, kemudian diperlebar menjadi Rp 86-100 triliun, dan kembali dikoreksi lebih optimistis menjadi Rp 100-125 triliun. Nilai itu tercatat tumbuh 71,23% secara tahunan (*year on year/yo*).

Sebelumnya, penyaluran pembiayaan *fintech lending* memang terus meningkat setiap tahun sejak 2017. Pada saat itu, pembiayaan tercatat Rp 3 triliun atau tumbuh 567% (*yo*). Kemudian naik 175% (*yo*) menjadi Rp 20 triliun pada 2018. Pertumbuhan itu berlanjut pada 2019, penyaluran pembiayaan meningkat 20% (*yo*) menjadi Rp 58 triliun. Selanjutnya naik 25% (*yo*) menjadi Rp 73 triliun pada 2020.

Ketua Bidang Humas AFPI Andi Taufan Garuda Putra mengakui bahwa pihaknya kembali meningkatkan proyeksi penyaluran pem-

biayaan tahun ini. Sebaliknya, hal itu dipercaya mampu direalisasikan meskipun jumlah penyelenggara *fintech lending* relatif berkurang.

"Hal itu terlihat dari bertambahnya jumlah pemberi pinjaman (*lender*) baik dari ritel maupun institusional. Namun diperlukan edukasi lebih masif kepada masyarakat. Melalui edukasi, mereka bisa mengetahui apa saja risiko dan keuntungan berinvestasi ke platform *fintech*," kata Taufan kepada *Investor Daily*, Minggu (26/9).

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerangkan, pada akhir Desember 2020 jumlah penyelenggara *fintech lending* sempat mencapai 164 entitas. Jumlah itu susut menjadi 107 entitas per 8 September 2021. Sementara itu, akumulasi pembiayaan sejak 2016 hingga Agustus 2021 mencapai Rp 249 triliun. Pada saat yang sama, *outstanding* pembiayaan *fintech lending* mencapai Rp 26,1 triliun atau tumbuh 70,36% (*yo*), berikut tingkat keberhasilan bayar 90 hari (TKB 90) di level 98,23%.

Fintech lending telah berhasil membantu 68,41 juta penerima pinjaman (*borrower*), dengan jumlah transaksi mencapai 479 juta. Terda-



Andi Taufan G P

pat total 749,17 ribu rekening *lender*, dengan 190,67 ribu di antaranya merupakan rekening aktif. *Fintech lending* membukukan aset mencapai Rp 4,36 triliun, dengan kontribusi penyelenggara konvensional adalah Rp 4,24 triliun dan penyelenggara syariah sebesar Rp 115,72 miliar.

Sektor Prioritas

Lebih lanjut, Taufan mengungkapkan, sejumlah sektor masih akan menjadi prioritas untuk dibidik para penyelenggara *fintech lending*. "Sektor-sektor penyaluran pinjaman terbesar saat ini ada di sektor *e-commerce*, logistik, dan komunikasi. Selain itu *fintech* di Indonesia menasar pada individu dan UMKM, dan sektor dagang elektronik menjadi sektor yang sangat besar karena data-datanya sudah digital, sehingga memudahkan dalam proses pengecekan dan validasi," jelas dia.

Ihwal perkembangan *fintech lend-*

ing, menurut dia, selama tiga tahun terakhir *fintech* di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi salah satu pemain terbesar di Asean. Hal itu dapat dilihat dengan semakin banyaknya perusahaan *fintech* yang menggunakan teknologi terkini dan inovasi untuk mendukung keunggulan masing-masing penggunaan *fintech*. Termasuk dukungan akses internet di Indonesia meningkat 2,6 kali lipat selama lima tahun ini.

Namun demikian, kata Taufan, penyelenggara *fintech lending* mesti terdaftar dan berizin sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) untuk menjalankan operasionalnya. Oleh karena itu, pihaknya pun mengimbau para pengguna hanya menggunakan layanan *fintech lending* legal yang terdaftar dan berizin dari OJK.

Taufan menambahkan, kekuatan utama *fintech lending* adalah berkaitan dengan teknologi informasi (TI) karena keseluruhan proses lebih banyak bertumpu pada TI. Bisnis *fintech lending* membutuhkan komitmen untuk investasi pada TI. Dalam hal ini, *fintech lending* mesti terus mengembangkan infrastruktur TI guna menjangkau masyarakat yang lebih luas. "Oleh karena itu, *fintech* akan terus berkembang jangkauannya untuk mencapai pelanggan di jarak jauh untuk melengkapi keuangan konvensional dan berkolaborasi dengan lebih banyak lagi dari institusi lembaga keuangan atau nonlembaga keuangan, untuk memperluas distribusi," tandas Taufan.

Layanan QRIS Dukung UMKM untuk Naik Kelas

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan BukuWarung mendukung UMKM untuk naik kelas dengan memanfaatkan Quick Response Indonesia Standard (QRIS).



Fitri I Triswati

QRIS adalah pembayaran berbasis QR Code dalam rangka mendukung Blueprint Sistem Pembayaran 2025 yang diinisiasi oleh BI. Saat ini QRIS diadopsi oleh 10,4 juta pelaku usaha/*merchant*, termasuk UMKM (per 17 September 2021). Bahkan, 96% *merchant* pengguna QRIS tergolong UMKM. Hingga akhir 2021, BI menargetkan sebanyak 12 juta *merchant* sudah terintegrasi dengan QRIS.

Pengadopsian QRIS dalam bertransaksi merupakan langkah penting untuk memperluas literasi keuangan dan pengembangan digitalisasi UMKM. Pengadopsian QRIS dapat menaikkan kelas UMKM karena mendorong pelaku usaha untuk memiliki rekening bank, yang lebih lanjut membantu mereka berstatus *bankable* guna memperoleh berbagai layanan perbankan, termasuk bantuan permodalan. Selain itu, metode QRIS yang sifatnya nontunai dan nirsentuh dapat mendukung transaksi UMKM yang lebih memenuhi protokol kesehatan. Dengan demikian, diharapkan realisasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui pemberdayaan UMKM bisa dipercepat.

Untuk semakin memperluas adopsi metode pembayaran baru ini, BI bersama BNI dan BukuWarung, perusahaan teknologi penyedia ekosistem finansial digital untuk UMKM Indonesia, menggelar kegiatan webinar bertajuk Adopsi dan Pemanfaatan QRIS untuk UMKM Naik Kelas, yang diselenggarakan pada Sabtu (25/9).

Hadir dalam webinar Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Fitri I Triswati, Asisten Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Ginanjar, Vice President BNI Denny

Ricky Febu, *Senior Executive Vice President* Bisnis Digital BNI Rian Kasian, *Director of Sales and Merchant Experience* BukuWarung Adi Harlim; dan 180 pelaku UMKM dari berbagai kota Indonesia.

"Transformasi digital semakin penting untuk mendorong pemulihan ekonomi. Sebagai pilar penting dalam perekonomian Indonesia, UMKM perlu didukung dengan *digital features* yang mudah serta ekosistem keuangan digital yang terintegrasi. BI bersama industri dan asosiasi telah meluncurkan QRIS yang merupakan *game changer* untuk metode pembayaran ritel. QRIS ini menjadi solusi untuk pembayaran yang lebih sehat di masa pandemi karena meminimalkan kontak saat transaksi dan hal ini sesuai dgn rekomendasi WHO," jelas Fitri I Triswati dalam siaran pers, Minggu (26/9).

Menurut dia, sejak diluncurkan pada 2019, penggunaan QRIS telah tersebar di 34 provinsi dan 480 kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Kemudahan QRIS telah dinikmati oleh pengusaha berbagi segmen, termasuk UMKM. Hal tersebut menandakan makin luasnya ekosistem QRIS yang didukung oleh 66 penyelenggara baik bank maupun non-bank. Dengan kemudahan interkoneksi tersebut, saat ini diperkirakan lebih dari 80 juta masyarakat Indonesia baik di kota maupun di desa sudah dapat melakukan pembayaran melalui QRIS.

Dalam kesempatan webinar, pelaku UMKM didorong untuk mengadopsi penggunaan QRIS sebagai solusi pembayaran yang efisien dan aman, karena tidak harus menyiapkan kembalian dan menghindarkan pengguna

dari risiko menerima uang palsu saat bertransaksi.

"Inovasi teknologi dapat membuat layanan keuangan menjadi mudah, aman dan nyaman bagi nasabah. Digitalisasi membuka lebar pintu peluang inklusi ekonomi dan keuangan bagi seluruh masyarakat, khususnya UMKM. Oleh karena itu, BNI turut mengembangkan layanan keuangan berbasis digital yang dapat memberikan solusi bertransaksi, salah satunya pembayaran berbasis QRIS. Penggunaan QRIS juga diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan dan membentuk profil kredit UMKM yang selanjutnya dapat digunakan untuk memperoleh pembiayaan pengembangan usaha, seperti KUR dan produk perbankan lainnya," jelas Rian Kaslan.

Solusi Ekosistem Digital

Sementara itu, sebagai perusahaan teknologi yang memiliki *concern* tinggi terhadap UMKM di Indonesia, BukuWarung berupaya menghadirkan solusi berupa ekosistem digital untuk membantu para pelaku UMKM dalam mengelola dan mengembangkan bisnis secara efisien. Layanan BukuWarung mencakup pencatatan keuangan digital, pembuatan etalase *online*, penjualan produk digital (mulai pulsa ponsel, token listrik hingga *top-up* uang elektronik) hingga transaksi pembayaran dan pembiayaan. Jumlah pengguna BukuWarung sudah mencapai 6,5 juta pelaku UMKM yang tersebar di 700 kota/kabupaten.

Menanggapi kolaborasi BukuWarung dengan BI dan BNI dalam webinar ini, Adi Harlim menyampaikan pihaknya bangga dan terhormat dapat terlibat dalam kegiatan sosialisasi QRIS bersama BI dan BNI. "Bagi pengguna BukuWarung, adopsi QRIS ini memudahkan konsumen untuk fleksibel memilih opsi pembayaran ketika bertransaksi. Artinya, potensi pemasukan merchant BukuWarung juga semakin bertumbuh sehingga diharapkan kesejahteraan finansial para UMKM pun segera tercapai," jelas dia. (th)

BeritaSatu Foto/Mohammad Defrizal



Penguatan Modal Bank

Nasabah menunggu pelayanan di kantor cabang Bank BNI di Jakarta. Rencana penguatan modal untuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) senilai total Rp5,48 triliun telah disetujui oleh Komisi VI DPR RI. Dana suntikan negara ini akan dialokasikan dalam Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun anggaran 2022.

Hingga Agustus, Total Simpanan BPD Capai Rp 655 T

JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat total simpanan di bank pembangunan daerah (BPD) per Agustus 2021 mencapai Rp 655 triliun. *Tiering* simpanan dengan saldo Rp 100 juta sampai dengan Rp 200 juta naik paling tinggi sebesar Rp 3,38 triliun.

Ketua Dewan Komisiner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, dari total simpanan BPD tersebut, total simpanan yang dijamin LPS sebesar Rp 293,22 triliun atau naik Rp 14,46 triliun. Untuk distribusi di Pulau Jawa, simpanan BPD tertinggi adalah BPD Jabar sebesar Rp 110,23 triliun, serta jika dilihat total dana pihak ketiga (DPK) sebagian besar masih lebih besar di Pulau Jawa sebesar 78,3%. Sedangkan, di luar Pulau Jawa, yang terbesar adalah BPD Sumut dengan total simpanan tertinggi sebesar Rp 31,72 triliun.

"Jadi jika dilihat antara BPD Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, masih belum merata, tapi kami yakin dengan semakin tumbuhnya ekonomi di luar Pulau Jawa kontribusi BPD luar Pulau Jawa akan semakin besar lagi," jelas Purbaya secara virtual, akhir pekan lalu.

Melihat hal tersebut, dia mengimbau agar peran pemerintah daerah

lebih aktif lagi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya dan pusat akan terus mendukung untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Pihaknya juga berharap layanan BPD di luar pulau Jawa untuk lebih ditingkatkan sehingga kualitasnya sama dengan BPD di Pulau Jawa atau bahkan melebihi.

Purbaya menambahkan, bank juga bisa memanfaatkan peluang munculnya teknologi baru yang kini mulai terbuka lebar. BPD di luar Pulau Jawa juga bisa meningkatkan dana-dana dari korporasi untuk membantu bisnis di daerah agar lebih maju.

"Likuiditas BPD tergolong masih cukup *ample*, untuk itu kami berharap dapat lebih agresif untuk menyalurkan kredit sehingga pemulihan ekonomi daerah dapat berlangsung lebih cepat. Program Transformasi BPD ke depan pun perlu diarahkan untuk memelihara dan terus meningkatkan skala dan kinerja bisnis, dengan demikian BPD dapat lebih mampu berdaya saing tinggi dan mampu berkontribusi positif bagi daerah," terangnya.

Transformasi digital di industri perbankan termasuk BPD, bisa dijadikan pemicu bagi kebangkitan BPD, dan memberi kontribusi untuk pemerataan ekonomi daerah yang

berkesinambungan. Namun demikian, keamanan digital wajib menjadi perhatian demi melindungi nasabah.

"Dengan hadirnya layanan digital keuangan saat ini, sudah seharusnya menjadi pemacu bagi BPD untuk lebih bangkit dan melihatnya sebagai peluang. BPD yang dimiliki oleh pemda diharapkan dapat lebih mendukung perekonomian daerah masing-masing, salah satunya adalah dengan implementasi transaksi digital non tunai," jelas Purbaya.

Menurut dia, digitalisasi memang tren yang baik, namun, industri perbankan tidak boleh terlena dan juga peran nasabah untuk lebih teliti dalam penggunaan data pribadinya adalah dua hal yang sangat penting.

Terdapat dua hal utama mengenai mitigasi dan juga bagaimana kondisi perbankan di Indonesia pada era transformasi digital sekarang. Pertama, dari pihak bank pun harus memperkuat sistem keamanan siber-nya dan juga turut membantu nasabahnya terkait pemahaman dan pengelolaan data pribadi. "Kedua, dari sisi nasabah pun harus menyadari bahwa informasi data pribadi yang digunakan dalam bertransaksi baik melalui platform digital ataupun *e-commerce* itu harus dijaga," ujar Ary. (nid)

penjaminan simpanan, terlebih di era digital seperti sekarang.

Jaga Data Pribadi

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar menyatakan, transformasi digital adalah sebuah kecenderungan bagi setiap industri, termasuk industri perbankan. Namun di lain sisi, kejahatan siber pun dinilai semakin meningkat dan berisiko menimbulkan kerugian bagi pihak bank maupun nasabah. Dari sinilah peran perbankan untuk melaksanakan mitigasi risiko demi memproteksi data nasabah dan juga peran nasabah untuk lebih teliti dalam penggunaan data pribadinya adalah dua hal yang sangat penting.

Terdapat dua hal utama mengenai mitigasi dan juga bagaimana kondisi perbankan di Indonesia pada era transformasi digital sekarang. Pertama, dari pihak bank pun harus memperkuat sistem keamanan siber-nya dan juga turut membantu nasabahnya terkait pemahaman dan pengelolaan data pribadi. "Kedua, dari sisi nasabah pun harus menyadari bahwa informasi data pribadi yang digunakan dalam bertransaksi baik melalui platform digital ataupun *e-commerce* itu harus dijaga," ujar Ary. (nid)

moratelindo.co.id
broadband company

PT Mora Telematika Indonesia
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Bergerak dalam bidang usaha penyedia jasa internet, penyedia pusat data, dan penyedia jaringan interkoneksi domestik dan internasional
Kantor Pusat: Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia
Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882
Website: www.moratelindo.co.id
Email: corsec@moratelindo.co.id

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Direksi PT Mora Telematika Indonesia ("Perseroan") dengan ini menyampaikan informasi kepada publik bahwa pada tanggal 23 September 2021 telah ditandatangani dibawah tangan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terkait Persetujuan Rencana Transaksi Akuisisi Saham PT Indo Pratama Teleglobal ("PT IPT"), dengan ringkasan hasil keputusan menyetujui pelaksanaan rencana transaksi untuk :

- Membeli atau menggubalil sebagian besar saham yang telah dikeluarkan oleh PT Indo Pratama Teleglobal ("PT IPT") yaitu 145.730 (seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh) lembar saham yang dimiliki PT Telekomunikasi Nusantara Sejajtera ("PT TNS") di dalam PT IPT yang merupakan 65% (enam puluh lima persen) dari saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT IPT, dengan total harga pembelian Rp18.216.250.000,- (delapan belas miliar dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Mengambilil dan menerima pengalihan hak atas uang muka modal saham yang telah distorkan oleh PT TNS ke dalam PT IPT sebesar Rp39.300.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus juta Rupiah).

Dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada Perseroan dan untuk kepentingan terbaik Perseroan. Untuk selanjutnya disebut "**Persetujuan Rencana Transaksi**".

Secara hukum Sebagai tindak lanjut dari Persetujuan Rencana Transaksi ini, Perseroan akan menandatangani perjanjian jual beli saham dengan PT TNS dimana untuk selanjutnya Perseroan akan memiliki aset berupa kepemilikan saham PT IPT sebesar 65%.

Dampak kegiatan operasional, kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan adalah Meningkatkan ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Sehubungan dengan informasi-informasi yang disampaikan diatas, perlu disampaikan juga bahwa Persetujuan Rencana Transaksi ini telah mendapatkan persetujuan dari seluruh kreditor Perseroan sebagaimana kewajiban Perseroan yang dimanatkan dalam perjanjian-perjanjian kredit/pembiayaan.

Informasi yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi merupakan informasi yang diungkapkan Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 27 September 2021
PT Mora Telematika Indonesia
Direksi